



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Juli 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SUB UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SALIMIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **154002**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 465.346.350**

1. Tanah Seluas 3.929 m² di SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 28.092.350
2. Tanah Seluas 2.559 m² di SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 51.980.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/100 m² di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 286.312.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m²/27 m² di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 98.962.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 164.000.000**

1. LAINNYA, - SEPEDA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 9.300.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 140.994.959****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 779.641.309**

III. HUTANG **Rp. 285.944.935****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 493.696.374**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.